
Analisis Tipologi Daerah di Indonesia Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah

Akmal Fikriasnyah Manto¹, Syarwani Canon², Bobby Rantow Payu³, Fahrudin Zain Olilingo⁴

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia ^{1,2,3,4}

E-mail: Akmal_s1ekobang@mahasiswa.ung.ac.id¹

Abstract: *This study aims to analyze the typology of regions in Indonesia based on fiscal capacity and to identify the distribution of the Regional Fiscal Capacity Index (IKF) by considering indicators such as Gross Regional Domestic Product (GRDP), poverty rate, economic growth, and Human Development Index (HDI). The research uses secondary data from 2023 obtained from the Ministry of Finance and Statistics Indonesia, covering 508 regencies and cities. The analytical methods employed are descriptive analysis and K-Means cluster analysis. The results show that the majority of regions fall into the low to medium fiscal capacity categories, while only a small number belong to the very high category. Furthermore, the relationship between IKF and development indicators is not always linear, as some regions with low fiscal capacity are able to achieve relatively high HDI, and vice versa. These findings highlight the need for fiscal policies that are more adaptive, equitable, and responsive to the actual conditions of each region.*

Keywords: *Regional Typology, Fiscal Capacity, IKF, Cluster Analysis, Regional Development.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi daerah di Indonesia berdasarkan kapasitas fiskal serta mengidentifikasi sebaran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF) dengan mempertimbangkan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan merupakan data sekunder tahun 2023 dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik yang mencakup 508 kabupaten/kota. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan kluster K-Means. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas daerah berada pada kategori kapasitas fiskal rendah hingga sedang, sementara hanya sebagian kecil yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi. Selain itu, keterkaitan antara IKF dan indikator pembangunan tidak selalu linier, di mana terdapat daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetapi mampu mencapai IPM tinggi, maupun sebaliknya. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan fiskal yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan nyata daerah.

Kata Kunci: *Tipologi Daerah, Kapasitas Fiskal, IKF, Analisis Kluster, Pembangunan Daerah*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan nasional, terutama dalam negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang sangat beragam. Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mempercepat proses pemerataan pembangunan dan pengentasan ketimpangan antarwilayah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, tanggung jawab dalam penyediaan layanan publik lebih banyak dibebankan kepada pemerintah daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal menjadi pilar utama dalam mendukung otonomi yang efektif. Kapasitas fiskal menentukan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pengeluaran publik secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik dan hasil pembangunan (Sari & Prasetyo, 2021). Hal ini menjadi perhatian utama dalam kebijakan fiskal nasional untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

Kapasitas fiskal daerah umumnya diukur melalui Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang mencerminkan kemampuan riil daerah dalam menghasilkan pendapatan dan membiayai pengeluaran. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, secara berkala menerbitkan peta kapasitas fiskal sebagai rujukan dalam alokasi dana transfer ke daerah. Namun, penggunaan IKFD secara tunggal dalam menilai kemandirian fiskal seringkali mengabaikan aspek pembangunan lainnya yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai indikator pembangunan ekonomi dan sosial.



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2023

Gambar 1. Urutan Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Tahun 2023

Data Kementerian Keuangan Tahun 2023 menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antarprovinsi dalam hal kapasitas fiskal. Provinsi dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, seperti DKI Jakarta (3,410), Kalimantan Timur (3,652), dan Papua Barat (3,877), memiliki kemampuan keuangan yang relatif kuat untuk mendanai pembangunan secara mandiri. Kondisi ini umumnya ditopang oleh potensi ekonomi besar, baik dari sektor industri, perdagangan, maupun sumber daya alam. Sebaliknya, provinsi seperti Sulawesi Utara (1,172), Bengkulu (1,173), dan Sulawesi Tengah (1,360) termasuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat rendah. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya produktivitas ekonomi daerah.

Sejalan dengan itu, berbagai studi menunjukkan bahwa indikator pembangunan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki keterkaitan erat dengan kapasitas fiskal suatu wilayah (Qisthina & Wahyudi, 2020). PDRB menjadi cerminan kekuatan ekonomi daerah yang menjadi basis utama pemungutan pajak dan retribusi. Tingkat kemiskinan yang tinggi justru memperbesar beban belanja sosial, sehingga melemahkan kapasitas fiskal. Sementara itu, IPM memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan efektivitas belanja publik. Dengan demikian, pengukuran kapasitas fiskal yang mengintegrasikan indikator-indikator tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai kondisi riil suatu daerah.

Tipologi daerah berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat memberikan pemetaan yang lebih holistik terhadap kondisi fiskal dan pembangunan suatu wilayah. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai penelitian sebagai dasar dalam perumusan kebijakan fiskal yang adil dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Putri & Paddu, 2025). Penentuan tipologi bukan hanya berdasarkan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, sehingga hasilnya lebih representatif. Hal ini sejalan dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis wilayah yang menekankan pada keberagaman karakteristik daerah.

Namun demikian, masih sedikit penelitian yang mengkaji tipologi fiskal daerah dengan mengintegrasikan indikator sosial ekonomi secara bersamaan. Sebagian besar studi hanya fokus pada satu atau dua indikator, tanpa mempertimbangkan hubungan multidimensional yang kompleks antara kapasitas fiskal dan pembangunan (Masbira, 2019). Keterbatasan ini menyebabkan kesenjangan pengetahuan dalam memahami bagaimana karakteristik fiskal dan sosial ekonomi daerah saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian yang dapat menjembatani kesenjangan ini melalui pendekatan kuantitatif yang komprehensif.

Analisis tipologi fiskal dengan pendekatan kluster merupakan metode yang relevan untuk mengelompokkan daerah berdasarkan kemiripan karakteristik fiskal dan pembangunan. Teknik ini memungkinkan pengelompokan wilayah yang lebih objektif, tanpa terjebak pada klasifikasi administratif yang bersifat konvensional (Y. Wijaya, 2013). Dengan demikian, hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, tipologi hasil kluster juga dapat digunakan dalam evaluasi efektivitas kebijakan transfer fiskal.

Dalam konteks kebijakan fiskal di Indonesia, penggunaan klasifikasi fiskal sangat penting untuk menentukan afirmasi dana transfer pusat ke daerah. Saat ini, penetapan afirmasi dana transfer masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi disparitas fiskal dan pembangunan antarwilayah (Ardiansyah & Yuliawan, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan model klasifikasi yang lebih adaptif terhadap kondisi aktual daerah. Analisis tipologi berbasis IKFD dan indikator pembangunan memberikan peluang untuk memperbaiki skema tersebut secara lebih berkeadilan.

Selain mendukung kebijakan fiskal, tipologi daerah juga penting untuk kepentingan perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil klasifikasi untuk merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan tantangan wilayah masing-masing. Hal ini akan meningkatkan efektivitas alokasi anggaran dan mengurangi risiko kesenjangan sosial ekonomi. Oleh sebab itu, kajian ini memiliki nilai strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah perlu diiringi dengan peningkatan kualitas belanja dan tata kelola. Kapasitas fiskal yang tinggi tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan jika tidak didukung oleh efisiensi anggaran dan partisipasi publik (Fjeldstad & Heggstad, 2012). Oleh karena itu, klasifikasi daerah berdasarkan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan output pembangunan secara konkret. Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal akan lebih fokus pada hasil (outcome-based policy).

Secara empiris, disparitas kapasitas fiskal di Indonesia sangat mencolok, terutama antara daerah di Jawa dan luar Jawa. Sebagian daerah kaya sumber daya alam justru memiliki IKFD rendah akibat lemahnya sistem pemungutan pajak dan transfer pusat yang tidak proporsional (Herdiyana, 2019). Situasi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan evaluasi dan pemetaan ulang kapasitas fiskal berbasis data terkini. Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan afirmatif fiskal.

Upaya mendorong kemandirian fiskal daerah juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas institusi dan kapasitas SDM di pemerintahan daerah. Tanpa reformasi birokrasi dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, potensi PAD sulit dioptimalkan (Suharto, 2020). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik tipologi fiskal menjadi penting untuk merancang strategi peningkatan kapasitas fiskal yang tepat. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam aspek tersebut secara aplikatif.

Penerapan analisis kluster dalam konteks tipologi fiskal relatif belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, khususnya di tingkat nasional. Padahal, metode ini dapat menghasilkan segmentasi daerah yang lebih realistis berdasarkan data kuantitatif. Dengan pendekatan ini, klasifikasi daerah tidak lagi bersifat normatif tetapi didasarkan pada evidensi empiris (Prasetyo, 2019). Inilah yang menjadi nilai tambah dari penelitian ini.

Dari segi kebijakan publik, hasil klasifikasi tipologi fiskal dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun formula transfer dana yang lebih akurat. Misalnya, daerah yang tergolong dalam kluster fiskal rendah dan IPM rendah dapat diprioritaskan dalam program intervensi sosial dan penguatan PAD. Sementara itu, daerah dalam kluster fiskal tinggi dapat diberi insentif untuk memperluas inovasi kebijakan fiskal lokal. Dengan demikian, intervensi fiskal menjadi lebih terukur dan berdampak.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan kluster (K-means) untuk mengidentifikasi pola tipologi fiskal daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh klasifikasi wilayah berdasarkan data objektif dan menghindari bias subjektif. Selain itu, teknik ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik IKFD dan indikator pembangunan sosial ekonomi. Pemilihan pendekatan ini juga memperkuat nilai akademik dari penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai metode dalam pengumpulan data, dimana peneliti ini diharapkan dapat menjelaskan analisis tipologi daerah di Indonesia berdasarkan kapasitas fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel-variabel yang digunakan dalam menentukan kapasitas fiskal daerah. Statistik deskriptif mencakup ukuran-ukuran seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan simpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing indikator, yaitu Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1 Statistik Deskriptif Indikator Kapasitas Fiskal Daerah (2023)

Indikator	Minimum	Maksimum	Mean (Rata-rata)	Standar Deviasi
Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)	0,67	1,74	1,09	0,26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,48	927,23	65,71	73110,41
Tingkat Kemiskinan	2,27	31,78	10,40	5,43

Pertumbuhan Ekonomi (PE)	-10,37	42,41	4,74	3,29
Inedeks Pembangunan Manusia (IPM)	35,19	88,28	70,88	6,78

Sumber: Data diolah 2025. Excel

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai IKF tertinggi mencapai 5,94, yang menunjukkan adanya daerah dengan kemampuan fiskal sangat tinggi dan relatif mandiri dalam pembiayaan belanja publik. Sebaliknya, terdapat pula daerah dengan IKF hanya 0,26, yang mengindikasikan ketergantungan yang cukup besar pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Tipologi Daerah Berdasarkan Kapasitas Fiskal

Pengelompokan ini mengacu pada ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.07/2023, yang menetapkan lima kategori kapasitas fiskal daerah berdasarkan rentang nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), sebagai berikut:

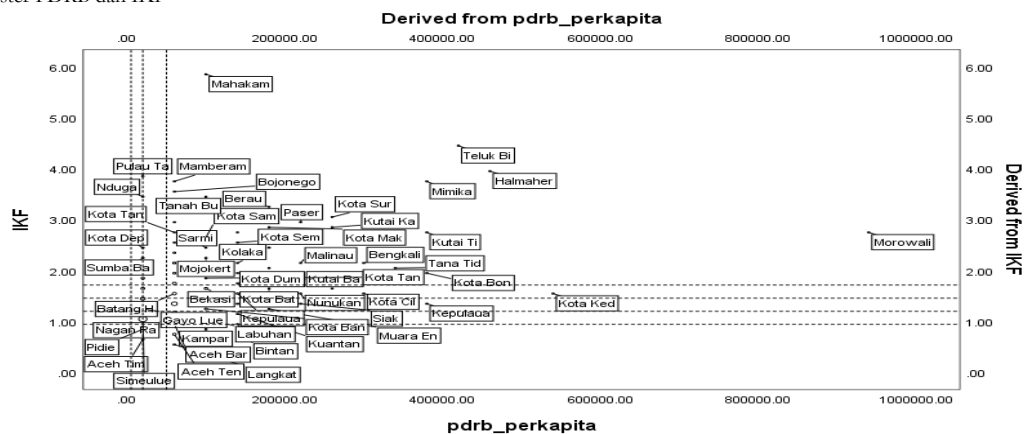
Tabel 2 Jumlah Kabupaten/Kota berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal

Kategori Kapasitas Fiskal	Rentang Nilai IKF	Jumlah Kabupaten/Kota
Sangat Tinggi	1,717 < IKF	107
Tinggi	1,459 < IKF < 1,715	71
Sedang	1,203 < IKF < 1,459	109
Rendah	0,947 < IKF < 1,203	149
Sangat Rendah	IKF < 0,947	72
Total		508

Berdasarkan hasil klasifikasi Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) terhadap 508 kabupaten/kota di Indonesia, diperoleh bahwa sebagian besar daerah berada dalam kategori "Rendah", yaitu sebanyak 149 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari seperempat wilayah di Indonesia masih memiliki kemampuan fiskal yang terbatas untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri, yang dapat berdampak pada keterbatasan dalam penyediaan layanan publik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan. Fenomena ini juga mencerminkan ketimpangan dalam kapasitas fiskal antar wilayah yang dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan.

Analisis Klaster

1. Klaster PDRB dan IKF



Sumber : Data diolah 2025. SPSS

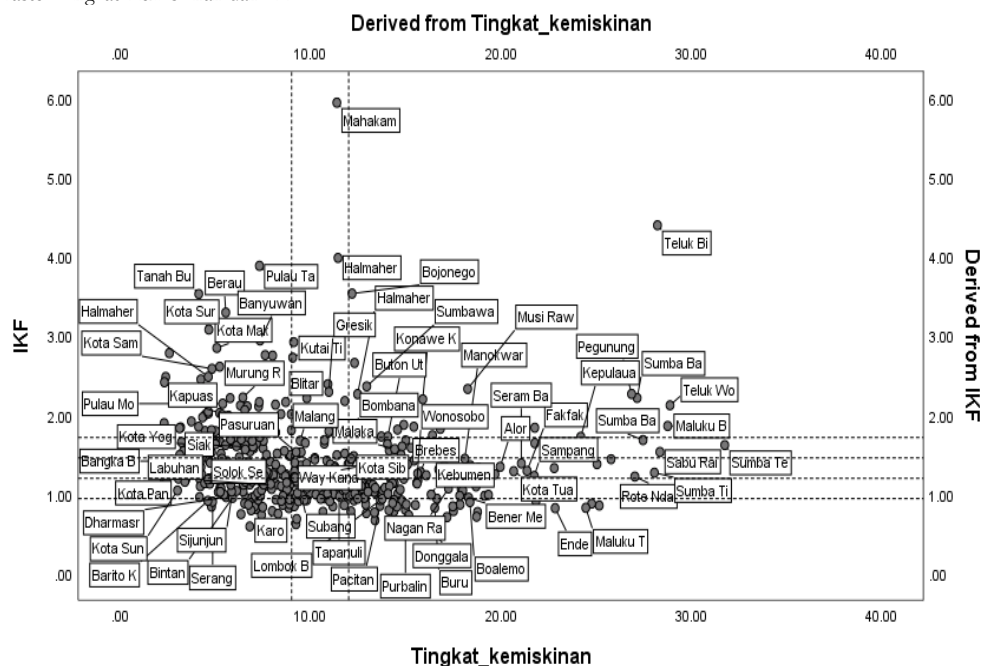
Gambar 2. Klaster PDRB dan IKF

Gambar grafik di atas menggambarkan hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Sumbu horizontal menunjukkan tingkat PDRB per kapita sebagai indikator kekuatan ekonomi daerah, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai IKF yang merepresentasikan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan publik secara mandiri. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar daerah terkonsentrasi di bagian kiri bawah grafik, yang berarti memiliki PDRB per kapita dan IKF yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas daerah di Indonesia masih memiliki keterbatasan ekonomi dan fiskal, terutama di wilayah dengan basis ekonomi agraris dan ketergantungan tinggi pada transfer pemerintah pusat.

Beberapa daerah menonjol di posisi ekstrem atas grafik, seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Teluk Bintuni, Halmahera, dan Morowali, yang memiliki nilai IKF tinggi maupun PDRB per kapita yang besar. Daerah-daerah ini umumnya didominasi oleh sektor industri ekstraktif seperti pertambangan dan migas yang menghasilkan nilai tambah ekonomi tinggi serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Namun, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan karena ketergantungan pada sumber daya alam seringkali menyebabkan fluktuasi fiskal yang besar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuatan fiskal yang tinggi di beberapa daerah bukan semata karena efisiensi tata kelola, melainkan didorong oleh potensi ekonomi alam yang besar.

Sebaliknya, daerah-daerah seperti Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Sijunjung berada di posisi bawah grafik dengan nilai IKF dan PDRB per kapita rendah. Hal ini menggambarkan daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat basis ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Beberapa daerah seperti Kota Batam, Kota Surabaya, dan Kota Bekasi berada di posisi tengah, menunjukkan keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kekuatan ekonomi. Dengan demikian, grafik ini menegaskan adanya kesenjangan yang cukup tajam antarwilayah di Indonesia, di mana sebagian kecil daerah dengan basis ekonomi kuat menikmati kapasitas fiskal tinggi, sementara mayoritas daerah lainnya masih perlu didorong melalui kebijakan fiskal yang lebih adil dan afirmatif untuk mencapai keseimbangan pembangunan nasional.

2. Kluster Tingkat Kemiskinan dan IKF



Sumber : Data diolah 2025. SPSS

Gambar 3. Kluster Tingkat Kemiskinan dan IKF

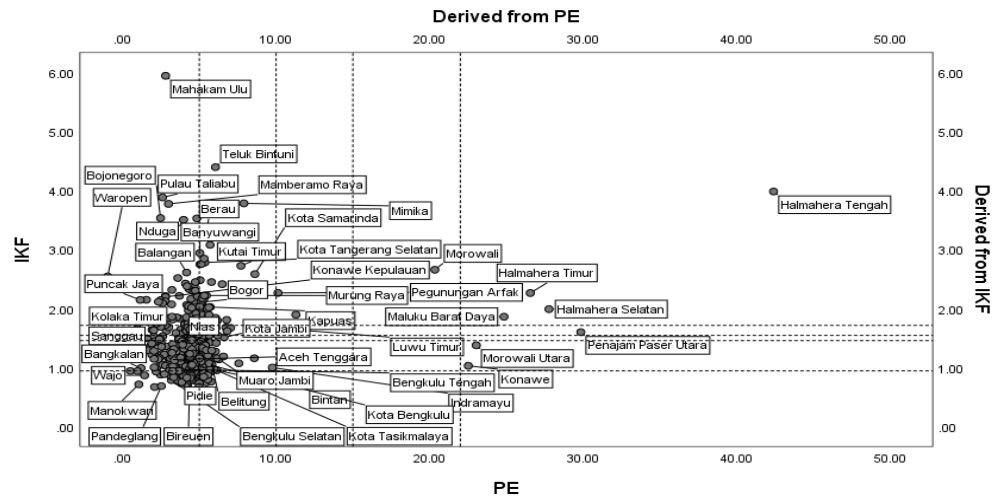
Grafik di atas menunjukkan hubungan antara Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Sumbu horizontal menggambarkan tingkat kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan sosial, sementara sumbu vertikal menunjukkan nilai IKF yang merepresentasikan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran publik secara mandiri. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar daerah terkonsentrasi di bagian tengah bawah grafik, menandakan tingkat kemiskinan menengah dengan kapasitas fiskal yang juga sedang. Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa daerah menonjol di posisi ekstrem atas grafik, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Teluk Bintuni, yang memiliki nilai IKF tinggi namun tingkat kemiskinan yang berbeda signifikan. Mahakam Ulu, misalnya, menunjukkan kapasitas fiskal tinggi dengan tingkat kemiskinan rendah, mencerminkan daerah kaya sumber daya alam yang mampu menghasilkan penerimaan besar dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, Teluk Bintuni memiliki IKF tinggi namun tingkat kemiskinan juga tinggi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat fiskal serta belum optimalnya alokasi belanja publik untuk pengentasan kemiskinan. Fenomena ini menggambarkan bahwa kekuatan fiskal suatu daerah tidak selalu berbanding lurus dengan capaian kesejahteraan sosial.

Sementara itu, sejumlah daerah seperti Sumba Barat, Maluku Tenggara, dan Rote Ndao berada di posisi kanan bawah grafik dengan tingkat kemiskinan tinggi dan IKF rendah. Daerah-daerah ini mencerminkan wilayah dengan keterbatasan ekonomi struktural dan ketergantungan besar terhadap transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, beberapa kota seperti Surabaya, Malang, dan Gresik menunjukkan posisi relatif stabil di tengah dengan IKF cukup tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, menandakan tata kelola fiskal dan ekonomi yang lebih efisien. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal yang kuat belum

tentu menjamin penurunan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang lebih terarah dan berorientasi pada pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah.

3. Kluster Pertumbuhan Ekonomi dan IKF



Sumber : Data diolah 2025. SPSS

Gambar 4. Kluster Pertumbuhan Ekonomi dan IKF

Grafik di atas memperlihatkan hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) pada berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Sumbu horizontal menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai IKF yang mencerminkan kemampuan fiskal suatu wilayah dalam membiayai pengeluaran publik secara mandiri. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar daerah terkonsentrasi di bagian kiri bawah grafik, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang rendah hingga sedang dengan kapasitas fiskal yang juga terbatas. Pola ini menandakan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Beberapa daerah menonjol dengan posisi ekstrem pada grafik, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Teluk Bintuni, yang memiliki IKF tinggi meskipun pertumbuhannya tidak terlalu besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal di daerah tersebut lebih banyak ditopang oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan dan migas yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, meski tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi secara merata. Di sisi lain, Kabupaten Halmahera Tengah menempati posisi paling kanan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan IKF juga kuat, menandakan adanya peningkatan signifikan pada sektor produksi yang turut memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, daerah-daerah seperti Bireuen, Pandeglang, dan Wajo berada di posisi bawah dengan nilai IKF dan pertumbuhan ekonomi yang sama-sama rendah. Kondisi ini menggambarkan daerah yang masih menghadapi keterbatasan struktural dalam perekonomian serta ketergantungan besar pada dana transfer pusat. Sebaliknya, beberapa kota seperti Samarinda, Tangerang Selatan, dan Banyuwangi menunjukkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi menengah dengan kapasitas fiskal yang relatif tinggi, mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal di wilayah perkotaan dan industri. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal tidak selalu linier—beberapa daerah dengan pertumbuhan tinggi belum tentu memiliki kemandirian fiskal yang kuat, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kapasitas fiskal secara berkelanjutan.

pengelolaan anggaran. Contoh yang kontras dapat ditemukan pada daerah seperti Halmahera Tengah, yang berhasil mengonversi kapasitas fiskal tinggi menjadi percepatan pembangunan daerah melalui perencanaan dan alokasi anggaran yang strategis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah pusat dan daerah harus saling melengkapi dalam meningkatkan kapasitas fiskal nasional. Pemerintah pusat diharapkan memperkuat kebijakan transfer fiskal berbasis kebutuhan dan kinerja, sehingga dapat memicu pemerataan pembangunan antarwilayah. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memperkuat kemampuan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi belanja publik, serta mengarahkan alokasi anggaran pada program-program yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.

SARAN

Bagi pemerintah pusat diperlukan penyempurnaan dalam skema transfer fiskal dengan memperhatikan kapasitas fiskal aktual dan indikator sosial-ekonomi lainnya, guna mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan juga kebijakan afirmatif berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berbasis kebutuhan dan prestasi kinerja daerah perlu diperluas dan difokuskan pada daerah dengan IKF rendah dan tingkat kemiskinan tinggi.

Bagi pemerintah daerah, terutama yang tergolong dalam kategori kapasitas fiskal rendah, perlu melakukan inovasi dalam penggalian dan pengelolaan PAD dengan memperluas basis pajak, mengurangi kebocoran retribusi, serta memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Dan juga penguatan tata kelola anggaran dan efektivitas belanja publik perlu menjadi prioritas, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu tahun data (2023), sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan data panel (time series) agar dapat melihat dinamika kapasitas fiskal secara longitudinal. Dan juga perlu dilakukan pengembangan model analisis dengan memasukkan variabel kelembagaan, kualitas belanja publik, dan indikator tata kelola lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait efektivitas penggunaan kapasitas fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., & Yulianan, D. (2024). Evaluasi kebijakan transfer fiskal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(1), 45–60.
- Aritonang, T. (2022). Kapasitas Fiskal dan Ketimpangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2019). Sequencing Fiscal Decentralization. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2021). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Fjeldstad, O.-H., & Heggstad, K. (2012). The role of local government in revenue collection: A comparative study of local government revenue in Africa. *International Centre for Tax and Development*.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Herdiyana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1, 22.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Masbira, R. A. (2019). Analisis IPM dan disparitas pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 33–44.
- Musgrave, R. A. (2015). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill, 118.
- Oates, W. E. (2019). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Prasetyo, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123–135.
- Putri, A., & Paddu, A. H. (2025). Tinjauan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di pusat pertumbuhan kawasan tengah Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 4, 141–172.
- Qisthina, F. A., & Wahyudi, S. T. (2020). Analisis kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 10, 116–136.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics (19th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Sari, R., & Prasetyo, S. (2021). Kapasitas Fiskal dan Ketimpangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 115–130.

Sari, R., & Prasetyo, A. (2021). Analisis kemandirian fiskal daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1, 45–60.

Sihombing, D. (2021). Analisis Kesenjangan Fiskal dan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*.

Stiglitz, J. E. (2018). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). New York: W. W. Norton & Company.

Suharto, R. (2020). Reformasi birokrasi dan kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 101–115.

Sukirno, S. (2018). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Addison-Wesley.

UNDP. (2019). *Human Development Report 2019*. New York: United Nations Development Programme.

Wijaya, O. (2013). Analisis Tipologi Wilayah dalam Prespektif Pembangunan Perdesaan Berbasis Sumberdaya Lokal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Wijaya, Y. (2013). Penggunaan analisis kluster dalam penentuan tipologi daerah. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 9(1), 55–66.

World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: Fiscal Policies for Development*. World Bank Publications.